

DISERTASI

**PENERAPAN *FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT* DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI HAK
MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Dalam rangka memperoleh gelar Doktor Hukum**



Diajukan Oleh
RAHMI JASIM
NIM. 2030112015

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

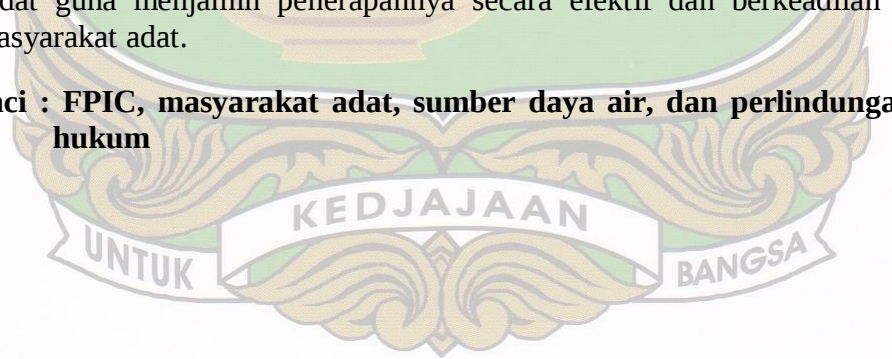
ABSTRAK

PENERAPAN *FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT* DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBAGAI HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

Rahmi Jasim, No. Bp. 2030112015, Program Studi Doktor Hukum Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 2025

Disertasi ini mengkaji penerapan *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam pengelolaan sumber daya air sebagai hak Masyarakat adat di Indonesia. FPIC merupakan hak yang diakui dalam hukum internasional, khususnya dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), yang menjamin masyarakat adat untuk memberikan persetujuan secara bebas, tanpa paksaan, berdasarkan informasi yang memadai dan dilakukan sebelum adanya keputusan yang memengaruhi wilayah adat mereka. Meskipun telah mendapat pengakuan secara substansial dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, penerapan FPIC dalam sektor sumber daya air belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti dominasi pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) yang sering kali mengabaikan hak masyarakat adat, lemahnya norma perlindungan terhadap wilayah ulayat dalam regulasi sumber daya air, serta berbagai konflik yang melibatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh studi empiris, disertasi ini menganalisis peraturan perundang-undangan, praktik pengelolaan di lapangan, dan studi kasus di berbagai wilayah adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FPIC dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hak Masyarakat adat atas sumber daya air di Indonesia, dan sebagai instrument internasional FPIC mengikat Indonesia secara yuridis dan moral. Diperlukan penguatan landasan yuridis FPIC melalui legislasi nasional, integrasi ke dalam sistem perizinan, serta penguatan kelembagaan dan regulasi lokal berbasis kearifan adat guna menjamin penerapannya secara efektif dan berkeadilan di wilayah masyarakat adat.

Kata Kunci : FPIC, masyarakat adat, sumber daya air, dan perlindungan hukum



ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FREE, PRIOR, AND INFORMED CONSENT IN THE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES AS THE RIGHT OF INDIGENOUS PEOPLES IN INDONESIA

Rahmi Jasim, Student ID No. 2030112015, Doctoral Program in Law, Faculty of
Law, Andalas University, 2025

This dissertation examines the implementation of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) in the management of water resources as a right of Indigenous Peoples in Indonesia. FPIC is a legally recognized right under international law, particularly in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), which guarantees that Indigenous Peoples may give or withhold their consent freely, without coercion, based on adequate information, and prior to the approval of any activities that may affect their traditional territories. Although FPIC has been substantially acknowledged in various national laws and regulations, its application in the water resources sector has not yet been explicitly regulated under Indonesia's positive law. This study also highlights the dominance of the State's Right to Control (Hak Menguasai oleh Negara/HMN), which often neglects the rights of Indigenous Peoples, the weak normative protection of customary territories in water resources regulations, and the frequent occurrence of conflicts involving Indigenous Peoples as legal subjects. Using a normative juridical approach supported by empirical studies, this dissertation analyzes statutory regulations, field management practices, and case studies in various customary areas. The findings demonstrate that FPIC can serve as a legal mechanism to protect Indigenous Peoples' rights over water resources in Indonesia and, as an international legal instrument, FPIC binds Indonesia both legally and morally. There is a need to strengthen the legal foundation of FPIC through national legislation, integrate it into the licensing system, and reinforce customary institutions and local regulations based on traditional wisdom to ensure its effective and equitable implementation within Indigenous territories.

Keywords: *FPIC, indigenous peoples, water resources, legal protection*

